

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai analisis pencatatan pengeluaran kas pada lembaga pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Datar, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pencatatan pengeluaran kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Datar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni berdasarkan kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, serta telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan BPBD Kabupaten Tanah Datar
2. Pada pengeluaran kas, dokumen yang digunakan adalah Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), kwitansi pembayaran dan bukti pembayaran lainnya, SP2D, bukti transfer, nota debit bank, buku jurnal pengeluaran kas, Surat Perintah Pembayaran (SPP), yang terdiri dari SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS
3. Dalam pelaksanaan pencatatan pengeluaran kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Datar terdapat beberapa resiko yang menjadi hambatan, diantaranya adalah: 1) Proses verifikasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dilakukan secara manual menyebabkan harus dilaksanakannya pemeriksaan berulang untuk memastikan tidak adanya kesalahan dalam pencatatan, akan tetapi hal ini dirasa kurang efektif karena akan memerlukan banyak waktu untuk melaksanakannya, 2) Apabila saat pemeriksaan kelengkapan dokumen ditemukan dokumen yang tidak valid atau tidak lengkap, maka bagian keuangan mengembalikan dokumen tersebut ke pengguna anggaran untuk di lengkapi terlebih dahulu, setelah pengguna anggaran melengkapi dokumen, kemudian diserahkan kembali kepada bagian keuangan untuk dicek kelengkapannya, namun hal ini juga memerlukan banyak waktu untuk pelaksanaannya, 3) Kesalahan pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang

mungkin baru ditemukan saat periode berjalan. Contohnya kesalahan yang mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, serta kelalaian maupun kecurangan lainnya. Kesalahan tersebut dapat menimbulkan masalah pertanggung jawaban pada masa yang akan datang, 4) Kesalahan input nota debit pada bank seperti ketidaksesuaian nomor rekening, ketidaksesuaian nominal uang dengan rincian per objek kegiatan maupun perbedaan pembukuan pada bagian keuangan dengan pihak bank yang mengharuskan dilakukannya rekonsiliasi secara berkala karena dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak balance

4. Dengan ditemukannya resiko dalam pencatatan pengeluaran kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Datar, maka diterapkanlah pengendalian internal untuk meminimalisir resiko tersebut, pengendalian yang telah diterapkan oleh BPBD Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut: 1) Telah dilakukan pengadministrasian untuk setiap dokumen masuk dan dokumen keluar dengan baik tanpa terkecuali untuk memastikan tidak ada SKPD yang mengajukan dokumen yang sama lebih dari satu kali, 2) Menggunakan aplikasi penunjang urusan keuangan daerah untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah. Diantara aplikasi tersebut antara lain: SP2D Online, SIMDA, NVA (Nagari Virtual Account) melalui e-Channel Bank Nagari, 3) Telah dilakukan pemisahan fungsi dan tanggung jawab terkait penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah Kabupaten Tanah Datar, guna menempatkan orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, 4) Telah dilakukan otorisasi transaksi pada setiap dokumen yang masuk maupun keluar yang ditandai dengan adanya tanda tangan kepala pelaksana BPBD dan stempel resmi BPBD. Apabila tidak ditemukan tanda otorisasi dan dokumen terkait, maka dokumen tersebut dianggap tidak sah, 5) Setiap pegawai yang memegang jabatan dan peran penting untuk mengamankan surat-surat penting maupun data-data keuangan BPBD, akan diberikan akses login khusus untuk mengontrol data-data rahasia tersebut tanpa diketahui pegawai lain yang tidak berkepentingan, 6) Telah dilakukan arsip secara berkala sebagai bahan pertanggungjawaban dimasa yang akan datang

## 5.2. Saran

Untuk menambah manfaat dari tugas akhir ini, penulis memberikan saran kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Datar yaitu:

1. Pencatatan pengeluaran kas yang diterapkan di BPBD Kabupaten Tanah Datar perlu ditingkatkan dikarenakan zaman sekarang yang semakin maju, BPBD dapat mengubah sistem pencatatan pengeluaran kas secara manual menjadi sistem pencatatan secara modern dengan terkomputerisasi mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi dan sistem informasi
2. Sebaiknya dilakukan evaluasi atas pencatatan pengeluaran kas pada BPBD Kabupaten Tanah Datar agar pencatatan pengeluaran kas pada BPBD Kabupaten Tanah Datar terlaksana dengan baik dan bebas dari kecurangan-kecurangan dan penyelewengan.

